BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang berdampak bagi kehidupan dan keberlangsungan makhluk hidup di dunia. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal dengan UUPPLH, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Seiring perkembangan waktu, lingkungan mengalami penurunan kualitas akibat pertumbuhan populasi dan perkembangan bisnis di berbagai sector. Kondisi lingkungan hidup saat ini dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja, terbukti dari banyaknya eksploitasi dan penghancuran lahan untuk dialihkan menjadi industry ekstraktif. Dampak akibat penghancuran dan pengalihan lahan menjadi wilayah industry ekstraktif, terutama di bidang perkebunan semakin eksisif¹

Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang secara ekonomis, ekologi dan social budaya memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Saat ini sector perkebunan mendominasi dalam pembangunan nasional karena banyaknya dukungan sumber daya yang besar dan komponen impor yang kecil akan dapat menghasilkan devisa non migas dalam jumlah yang besar² sehingga banyak perusahaan-perusahaan swasta tertarik untuk memperluas usahanya di sector perkebunan.

¹ Anon, 2021, Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global, hlm.4
<https://www.walhi.or.id/index.php/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global/> diakses 8 oktober 2021

² Dodi Devira, "Perkebunan Sebagai Sektor Perekonomian di Rohil", hlm 1,
<http://riau86.com/news/detail/4012/perkebunan-sebagai-sektor-perekonomian-di-rohil>, diakses 8 Oktober 2021

Salah satu perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia yaitu Perusahaan Perkebunan kelapa sawit. Perkebunan Kelapa Sawit berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah sebagai sumber penting dalam pengentasan kemiskinan melalui usaha budidaya dan pengolahan hilirnya³. Sawit memiliki peran penting bagi ekonomi negara, kesejahteraan petani maupun pendapatan nasional negara⁴. Produksi sawit di Indonesia saat ini mengalami peningkatan pesat seiring berkembangnya teknologi industry yang semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga menimbulkan banyak pelaku usaha atau perusahaan sawit yang berkembang di Indonesia.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi terbesar di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan adalah Kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat yang memiliki berbagai macam pabrik, di antaranya pabrik kertas, pabrik karet dan pabrik sawit. Hal ini membuktikan pesatnya pembangunan ekonomi di Kabupaten Pelalawan.

Salah satu perusahaan perkebunan swasta di Indonesia adalah PT.INTI INDOSAWIT SUBUR yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit merupakan anak perusahaan dari PT. Asian Agri . PT. INTI INDOSAWIT SUBUR memproduksi minyak sawit mentah melalui perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan. Pada saat ini PT. Asian Agri telah berkembang menjadi salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Asia yang mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 100.000 hektar di Sumatera Utara, Riau, dan Jambi⁵ . Perusahaan perkebunan swasta kelapa sawit ini meliputi pembibitan, penanaman, hingga pengolahan tandan buah segar (TBS) untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. Salah satu pabrik PT.INTI INDOSAWIT SUBUR tersebut terletak di Jalan Jl. Lintas Timur, Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten

³ Sudradjat,2020, “Kelapa Sawit : Prospek Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas”, Institut Pertanian Bogor, hlm 3

⁴ Firlana, 2019, “Tidak Hanya Minyak Sawit, Limbah Cair Sawit Dapat Dimanfaatkan Menjadi Sumber Energi Listrik”, *Sawit Indonesia* , hlm. 1,

⁵ Anon, Tentang Kami , hlm 1 <https://www.asianagri.com/id/tentang-kami> , diakses 8 Oktober 2021

Pelalawan, Riau 28654. Kegiatan bisnis kelapa sawit membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi masyarakat setempat khususnya sekitar pabrik di Kabupaten Pelalawan. Selain itu kegiatan bisnis ini juga berpotensi menimbulkan persoalan pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan telah menjadi salah satu permasalahan yang tengah dihadapi kota-kota besar di Indonesia. Pencemaran Lingkungan dapat dikatakan sebagai masuknya atau dimasukinya makhluk hidup atau komponen lain yang membuat berubahnya tatanan lingkungan atau proses alam yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Melihat besarnya potensi pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri, Valentino Darsono mengatakan, apabila hal ini tidak mendapat perhatian yang serius, maka antara industri dan lingkungan hidup tidak berjalan seiring, akan menimbulkan kesan bahwa semakin maju industri maka semakin rusak lingkungan hidup⁶. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan berasal dari perkebunan kelapa sawit adalah limbah kelapa sawit.

Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit baik berupa limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang dan fiber (sabut)⁷. Limbah Produktivitas pabrik kelapa sawit (PKS) menghasilkan limbah dengan volume sangat besar. Beberapa pabrik kelapa sawit yang berada di Indonesia masih menggunakan proses penggilingan basah, sehingga membutuhkan banyak air pada proses penggilingan. Hal ini memicu meningkatnya limbah cair kelapa sawit (*Palm Oil Mill Effluent*) sebagai buangan atau efek samping dari kegiatan produksi pengolahan kelapa sawit⁸. Limbah cair kelapa sawit memiliki potensi sebagai bahan pencemar lingkungan karena memiliki kandungan *Chemical Oxygen Demand (COD)*,

⁶ Valentinus Darsono, Pengantar Ilmu Lingkungan, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1995), hlm. 54

⁷ Andi Haryanti, Dkk, 2014, Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit, *Konversi*, Vol.3, No. 2, hlm. 20-21

⁸ Aras Firdaus, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Sawit, *Jurnal Legislasi*, Vol 17 No.2, hlm 225

Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan padatan tersuspensi yang tinggi sehingga dapat menurunkan kesuburan suatu perairan⁹.

Dalam Pasal 1 butir 2 UUPPLH ditegaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi peran swasta dan masyarakat juga sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sebagai salah satu upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah perlu adanya pengelolaan limbah cair yang baik oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negative yang ditimbulkan perusahaan kepada masyarakat sekitar, dan mengurangi polusi udara. PT. INTI INDOSAWIT SUBUR sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan mempunyai dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Salah satunya dampaknya adalah pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah cair dari hasil pengolahan buah kelapa sawit.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait Pengelolaan limbah cair Kelapa sawit PT INTI INDOSAWIT SUBUR sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kabupaten Pelalawan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan limbah cair kelapa sawit PT. INTI INDOSAWIT SUBUR sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kab Pelalawan Provinsi Riau?

⁹ Muliari Dan Zulfahmy, 2016, Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas Fitoplankton Di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Perikanan Dan Kelautan, Vol.6, No.2, hlm. 138

2. Apakah ada kendala dalam pengelolaan limbah kelapa sawit PT.INTI INDOSAWIT SUBUR sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kab Pelalawan Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan diadakannya penelitian ini, tujuan penelitian meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah cair kelapa sawit PT. INTI INDOSAWIT SUBUR sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kab Pelalawan Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan limbah kelapa sawit PT. INTI INDOSAWIT SUBUR sebagai upaya pengendalian pencegahan pencemaran di Kab Pelalawan Provinsi Riau

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis-sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait pengelolaan limbah cair dan pengendalian pencemaran.-

2. Manfaat Praktis : dapat menjadi pengetahuan dan saran bagi :

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pengawasan dan sosialisasi bagi pelaku bisnis Perkebunan Kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan khususnya daerah kabupaten Pelalawan

- b. Bagi Pelaku bisnis Perkebunan Kelapa sawit

Sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengolahan kelapa sawit sehingga mengetahui secara sistematis proses yang dilakukan dalam mengolah limbah cair kelapa sawit.

c. Bagi Masyarakat yang berada di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah dari pengolahan Kelapa Sawit

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum dengan judul Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit PT. INTI INDOSAWIT SUBUR Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran di Kab. Pelalawan Provinsi Riau adalah hasil karya penulis. Karya ini asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri. Sebagai perbandingan, terdapat laporan hasil penelitian yang disusun terlebih dahulu yaitu :

1. Suciati Alfi Rokhani, 110510628, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, dengan rumusan masalah Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat industry rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? dan Apa saja kendala yang dialami dalam proses pengendalian pencemaran lingkungan akibat industry rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten?

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Langkah pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 14 UU No 32 Tahun 2009 UUPPLH meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan belum dilakukan dengan baik karena masih kurangnya pengawasan pemerintah. Kendala- kendala yang dihadapi adalah Sebagian besar industry “mie soun” berskala kecil, sehingga tidak mampu untuk membuat IPAL dikarenakan biaya yang sangat mahal.

2. Boy Salomo Leonard Samosir, 050509195, Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha Laundry dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha laundry dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta dan apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha laundry dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh beberapa usaha laundry yang di teliti di Kota Yogyakarta sebagai Langkah pengendalian pencemaran lingkungan, belum terlaksana dengan baik dan kendala yang dihadapi pengelola usaha laundry adalah keterbatasan dana oleh masing-masing pengelola laundry untuk mengadakan Instalansi Pembuangan Air Limbah secara pribadi.

3. Maycarl Bernandinus, 150512012, Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit PT. Mukomuko Indah Lestari di Kabupaten Mukomuko dengan rumusan masalah Bagaimana aspek hukum pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair pabrik kelapa sawit PT. Mukomuko Indah Lestari di Kabupaten Mukomuko?

Apa saja kendala dan solusi terkait dengan pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair pabrik kelapa sawit PT. Mukomuko Indah Lestari?

Hasil Penelitian Upaya Pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Mukomuko telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur limbah cair yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 17 ayat (2) butir a , b , dan i. Butir a PT. Mukomuko Indah Lestari telah melakukan pengelolaan limbah cair dengan baik dengan berbagai proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan menyediakan berbagai kolam yang fungsinya berbeda-beda. Butir b PT. Mukomuko Indah Lestari telah menaati persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan sesuai dengan parameter yang ditetapkan di Kep-51/MENLH/10/1995 Lampiran B-IV dan SK Gubernur Bengkulu Nomor 92 Tahun 2001. Butir I PT. Mukomuko Indah Lestari telah menaati kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau, hal ini dapat dibuktikan dengan setiap bulannya air limbah yang dibuang ke sungai dianalisa ke laboratorium independent dan langsung membuat laporan semester yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko. Kendala dan solusi pengelolaan limbah cair tidak ada sama sekali. Hal ini dapat dibuktikan karena dalam pengelolaan limbah cair sendiri PT. Mukomuko Indah Lestari melakukan pengelolaan limbah cair dengan baik dengan menaati segala peraturan-peraturan yang mengatur. Kendala yang dialami pabrik hanya dalam mengelola limbah padat yaitu janjangan kosong yang biasanya hanya diberikan secara cuma -Cuma kepada masyarakat.

Adapun persamaan ketiga skripsi tersebut dengan rencana penelitian Penulis terletak pada topik Pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaan. Penulis pertama, Suciati Alfi Rokhani .Letak perbedaan antara

tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Suciati Alfi Rokhani terletak pada focus penelitian. Fokus penelitian penulis tersebut kepada upaya pengendalian lingkungan akibat industry rumahan produksi “mie soun” serta kendala yang dihadapi dalam rangka upaya pengendalian pencemaran lingkungan sedangkan penulis berkaitan dengan Aspek Hukum pengelolaan limbah cair PT.INTI INDOSAWIT SUBUR dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kab Pelalawan Provinsi Riau. Fokus penelitian Penulis kedua, Boy Salomo Leonard Samosir berfokus kepada pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha laundry di Kota Yogyakarta, sedangkan rencana penelitian penulis berkaitan dengan Aspek Hukum pengelolaan limbah cair PT.INTI INDOSAWIT SUBUR dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kab Pelalawan Provinsi Riau. Penulis ketiga, Maycarl Bernandinus berfokus kepada aspek hukum pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair pabrik kelapa sawit PT. Mukomuko Indah Lestari di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 17 ayat (2) butir a , b , dan i. serta Kep-51/MENLH/10/1995 Lampiran B-IV dan SK Gubernur Bengkulu Nomor 92 Tahun 2001. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang ditinjau dari salah satu sumber hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu UUPPLH

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Arti kata “Aspek” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sama dengan sudut pandangan. Maka, pengertian “aspek hukum” merupakan sudut pandang normatif yang dikaji atau ditinjau berdasarkan undang-

undang yang berlaku dan berkaitan dengan pengelolaan limbah sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum dilihat sebagai sarana dalam pengaturan dan pengelolaan limbah.

2. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Perusahaan Perkebunan adalah Pelaku Usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

3. Limbah cair

Limbah Cair kelapa sawit merupakan sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit. Limbah hasil pengolahan kelapa sawit dibedakan menjadi limbah cair yang dikenal dengan istilah POME (*Palm Oil Mill Effluent*).¹⁰

4. Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 UUPPLH, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat , energi , dan/ komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

5. Pencegahan Pencemaran

Berdasarkan Pasal 13 butir 1 UUPPLH, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

¹⁰ Wirda Hanim,Fadhliani,Sara Gustia Wibowo, 2020, Pengelohan Limbah Cair di Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Sisirau Desa Sidodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Jurnal EnviScience, Vol 4 No 2 Tahun 2020, Ilmu Kesehatan, hlm 67

6. Pengelolaan Limbah

Berdasarkan Pasal 1 butir 13 Perda Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, pengelolaan air limbah merupakan upaya terpadu dalam pengelohan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang telah dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat¹¹

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber sebagai data utama.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder terdiri atas :

a) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

¹¹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013 hlm 101)

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

(5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan

(6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber

b. Metode Pengumpulan Data

- 1) Wawancara yaitu proses komunikasi guna memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan terbuka terhadap responden dari pihak Manager dan Asisten KCP & Biogas PT.INTI INDOSAWIT SUBUR

2) Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

3. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang mengetahui atau memiliki informasi akurat mengenai data yang diperlukan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Hechi Valentino selaku Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pelalawan Provinsi Riau

4. Responden

Responden dalam penelitian hukum ini adalah Bapak Norton Sitorus selaku Manager Pengelolaan Limbah dan Dedek S Lumban Gaol selaku Asisten KCP & Biogas PT. INTI INDOSAWIT SUBUR

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.